

Buletin AIPJ3

Edisi Khusus | Juni 2026

Merayakan 15 Tahun Kemitraan dalam Sektor Keadilan



Nicola Campion
Minister-Counsellor for Political
and Strategic Communications,
Kedutaan Besar Australia,
Jakarta



Erwin Dimas,
S.E., D.E.A., M.Sc.
Plt. Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak
Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas)

Seiring dengan peringatan 15 tahun AIPJ, hal yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana kemitraan ini telah berkembang semakin matang serta tumbuhnya rasa kepemilikan bersama yang kuat. Indonesia dan Australia kini bekerja bahu-membahu, dan yang pada awalnya merupakan kerja sama teknis telah berkembang menjadi kolaborasi strategis yang memperkuat supremasi hukum dan sektor keamanan. Sangat membanggakan melihat bagaimana kemitraan ini tidak hanya memperkuat institusi masing-masing negara, namun sekaligus mempererat persahabatan yang telah lama terjalin antara Australia dan Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi khusus kepada rekan-rekan di Bappenas atas kepemimpinan dalam menata dan mengarahkan program ini.

Tanggung jawab saya di Kedutaan Besar Australia telah memberikan saya wawasan terkait cakupan serta kompleksitas kerja AIPJ. Reformasi sektor keadilan dan keamanan berlangsung dalam konteks yang dinamis, di mana prioritas seperti reformasi peradilan pidana, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan, serta kejahatan lintas batas selaras dengan kepentingan nasional dan kebutuhan di tingkat lokal. AIPJ menyediakan sarana strategis bagi lembaga Australia untuk bekerja sama secara erat dengan mitra Indonesia dalam mencapai prioritas bersama.

Salah satu pelajaran penting yang kami peroleh adalah bahwa kemajuan yang berkelanjutan bergantung pada rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kemampuan beradaptasi. Keberhasilan yang telah dicapai selama ini hadir dari kemauan untuk mendengarkan serta mendukung kepemimpinan Indonesia. Seiring munculnya tantangan baru, kemitraan ini juga harus terus berkembang secara luwes.

Ke depan, saya yakin AIPJ akan semakin memperdalam dampak dan kontribusinya di tingkat regional, serta terus menjadi contoh kemitraan modern dan strategis yang berlandaskan kepercayaan dan kerja sama yang kuat.

Kemitraan antara Australia dan Indonesia telah terjalin lama dan menghasilkan berbagai capaian yang signifikan. Melalui Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan (AIPJ) sejak 2011, kerja sama ini berlanjut melalui tahap kedua (2017–2025) dan kini memasuki tahap ketiga (2025–2030). Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat institusi hukum dan keamanan yang inklusif serta akuntabel guna mendukung penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Sebagai negara tetangga yang berdekatan secara geografis, Australia dan Indonesia memiliki kemitraan strategis yang sangat penting dalam menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, kerja sama ekonomi dan kelembagaan yang semakin erat turut mendorong kemakmuran bersama, pembangunan berkelanjutan, serta inovasi dalam transformasi digital dan tata kelola pemerintahan. Di tengah ketidakpastian global saat ini, kemitraan lintas kementerian dan lintas negara bukan sekadar strategi diplomatik, melainkan tanggung jawab bersama untuk terus membangun dialog yang terstruktur dan memperkuat kepercayaan timbal balik, sehingga pemerintah Indonesia dan Australia dapat menghadapi berbagai perubahan serta menghasilkan dampak nyata dan terukur dalam reformasi sektor keadilan dan keamanan.

Pada tahap ini, Bappenas membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra masyarakat sipil. Kemitraan ini kini melibatkan 20 kementerian/ lembaga serta sekitar 71 subprogram. Semoga keberlanjutan AIPJ membawa harapan besar bagi terwujudnya sistem peradilan yang lebih transparan, tangguh, dan berkeadilan, serta mampu memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Saya meyakini bahwa kolaborasi kita akan berkontribusi pada terciptanya masa depan yang lebih stabil dan berkeadilan bagi semua.



Craig Ewers
Team Leader, AIPJ3



Terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi testimoni semua rekan, baik yang baru bergabung maupun yang telah kebersamai perjalanan kami. Membaca semua testimoni, jelas terlihat bahwa AIPJ sebagai sebuah kemitraan telah memberikan dampak yang mendalam bagi banyak pihak yang terlibat.

Berbagai rekan menyoroti pencapaian yang berbeda-beda; semuanya bersifat transformatif dan hampir selalu berhasil dicapai meski melawan arus. Hal ini membutuhkan kepercayaan dan kesabaran — dua hal yang berulang kali disebutkan dalam refleksi rekan-rekan. AIPJ bukan sekedar menjalankan kegiatan, namun juga berkontribusi untuk mempererat hubungan Indonesia-Australia.

AIPJ juga berulang kali digambarkan sebagai jembatan: antara masyarakat sipil dan pemerintah, antara pengadilan serta lembaga penegak hukum Australia dan Indonesia, antara reformasi di tingkat nasional dan subnasional, antara para elit dan akar rumput, serta antara Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Bappenas yang mewakili Pemerintah Australia dan Indonesia. AIPJ telah menjadi jembatan antara kepentingan pembangunan dan keamanan.

Meski kegiatan program bersifat serius dan sensitif, semua pihak senang menjadi bagian dari AIPJ. Setelah 15 tahun beradaptasi secara berkelanjutan dan kini berevolusi dalam tahap ketiga, AIPJ dinilai sebagai program yang dipimpin secara lokal dan *dikelola dengan baik dan efektif*, serta terus berkembang. Semua pihak menunjukkan komitmen yang luar biasa: baik tim Bappenas, DFAT, AIPJ dan DT Global, serta seluruh mitra AIPJ merasa bangga atas capaian bersama dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, meskipun membutuhkan waktu.

Ini adalah perayaan atas sebuah kemitraan yang sangat positif, dan masih banyak yang perlu diperjuangkan. Saat ini, kita menghadapi rencana kerja paling ambisius yang pernah ada, dengan sumber daya yang terbatas, tekanan terhadap masyarakat sipil, ketidakpastian usaha, dan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan keadilan yang dijanjikan bagi mereka. Pemerintah Indonesia dan Australia memahami konteks ini dan memberi arahan yang jelas bagi AIPJ. Tingkat keterlibatan dari tim dan mitra kami belum pernah setinggi ini. Fokus kami adalah membantu mitra-mitra untuk menghasilkan capaian di bidang keadilan dan keamanan yang memberi manfaat bagi Indonesia dan Australia.

Semua rekan-rekan menaruh harapan besar terhadap AIPJ3. Kepercayaan dan dukungan Anda sangat kami hargai. Kami menjaga kepercayaan ini dengan terus berupaya memberikan yang terbaik.

Melihat kembali 15 tahun perjalanan AIPJ, untuk keadilan, salah satu tonggak pencapaian yang paling berharga bagi saya adalah peran AIPJ Tahap 1 dalam mendukung penyusunan dan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bagi saya, hal ini tidak hanya mengenai pengesahan UU, namun lebih dari itu. Hal ini menandai perubahan penting dalam cara Indonesia memahami akses terhadap keadilan. Sebelum adanya UU Bantuan Hukum, bantuan hukum di Indonesia tersekat-sekat, dan sebagian besar mengandalkan inisiatif dari NGO, universitas, lembaga bantuan hukum, serta kelompok masyarakat sipil. Inisiatif ini berharga tetapi belum mendapat dukungan yang kuat dari sistem nasional.

Melalui AIPJ, bantuan hukum diangkat ke dalam kerangka pembangunan yang lebih luas. AIPJ membantu memperkuat basis bukti, mendukung inisiatif percontohan, dan berkontribusi dalam pengembangan argumen kebijakan yang bermanfaat bagi pembuat keputusan. Inisiatif ini penting karena dalam perencanaan pemerintahan sebuah ide yang baik tidaklah cukup. Kebijakan membutuhkan pengembangan kapasitas, dukungan kelembagaan, dan kapasitas anggaran.

Sebagai Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bappenas pada saat itu, saya melihat UU Bantuan Hukum sebagai contoh konkret mengenai bagaimana kemitraan pembangunan dapat berkontribusi untuk reformasi struktural. Kemitraan ini mengubah hubungan antara negara dengan masyarakat. Akses terhadap keadilan tidak hanya dilihat sebagai bantuan sosial atau program amal namun menjadi bagian dari pengembangan kapasitas, tata kelola demokratis, dan tanggung jawab negara.

AIPJ juga membantu memperkuat kerja sama antara Bappenas dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum sebagai institusi nasional utama dalam proses ini. Hal tersebut sangat penting dari perspektif perencanaan pembangunan nasional. Di Bappenas, kami selalu meyakini bahwa suatu kebijakan tanpa institusi yang memiliki tanggung jawab yang jelas serta tanpa dukungan ruang fiskal hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas. Dukungan terhadap program bantuan hukum nasional menunjukkan bahwa reformasi hukum dapat diterjemahkan menjadi program nyata, dengan tanggung jawab kelembagaan yang jelas dan alokasi anggaran yang memadai.

Tonggak penting lainnya yang sangat berkesan bagi saya adalah pengembangan mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*). AIPJ mendukung kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Federal Court of Australia. Kerja sama ini membantu Indonesia merancang mekanisme yang lebih sederhana dan cepat untuk



*Dr. Diani Sadia
Wati S.H.,
LL.M.*

**Direktur Hukum dan Hak Asasi
Manusia (2002-2011); Direktur
Analisa Perundang-undangan
(2012-2016), Bappenas**

2011

menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil, sebuah mekanisme yang lebih relevan bagi masyarakat umum serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi UMKM, akses terhadap penyelesaian sengketa yang sederhana, terjangkau, dan tepat waktu bukanlah hal yang sepele. Hal tersebut memengaruhi kepastian berusaha, tingkat kepercayaan, dan iklim investasi.

Dari perspektif Bappenas, ini merupakan contoh yang baik tentang bagaimana reformasi sektor peradilan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Reformasi hukum sering kali dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Namun dalam kasus ini, dampaknya sangat nyata. Mekanisme peradilan yang lebih sederhana dapat mengurangi biaya penyelesaian sengketa, membantu usaha kecil, dan mendukung kemudahan berusaha.

Secara pribadi, pengalaman-pengalaman ini mengajarkan saya bahwa reformasi hukum di Indonesia tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Ada masa-masa ketika prosesnya terasa lambat. Pembahasan Rancangan UU Bantuan Hukum, misalnya, menghadapi berbagai penundaan dan tantangan politik. Di lingkungan peradilan, mekanisme baru seperti prosedur gugatan sederhana juga memerlukan pembahasan yang cermat karena pada dasarnya institusi cenderung berhati-hati dalam mengadopsi praktik-praktik baru.

Yang saya hargai dari AIPJ adalah kesabarannya. AIPJ tidak hanya bekerja melalui pertemuan-pertemuan formal pada jam kerja. AIPJ bekerja setiap saat melalui diskusi teknis, kelompok kerja, pembelajaran antar rekan (*peer learning*), serta membangun kepercayaan. AIPJ membantu menumbuhkan keyakinan dan rasa percaya diri di antara institusi-institusi Indonesia. Selain itu, pengalaman Australia digunakan bukan sebagai model yang harus ditiru, melainkan sebagai referensi untuk pembelajaran.

Bagi saya, inilah salah satu pelajaran yang paling penting. Di Indonesia, reformasi tidak dapat hanya mengandalkan gagasan-gagasan hukum yang kuat. Reformasi juga membutuhkan kepercayaan antarlembaga, para penggerak perubahan (*reform champions*), momentum politik yang tepat, serta kemampuan untuk menerjemahkan pengalaman internasional ke dalam konteks hukum, sosial, dan politik Indonesia sendiri.



Sebagai bagian dari tim desain dan implementasi AIPJ pada 2010-2015 di Canberra dan Jakarta, AIPJ tetap dekat di hati saya. Salah satu momen paling berkesan bagi saya adalah hadir di Istana Negara untuk menyaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan sistem bantuan hukum yang didanai negara yang pertama di Indonesia, sebuah tonggak capaian yang mencerminkan begitu banyak hal yang senantiasa saya perjuangkan terkait - akses terhadap keadilan dan kerja sama Australia - Indonesia yang mendalam. Pengalaman ini juga mengajarkan saya bahwa kemajuan dalam reformasi hukum dan keadilan jarang berjalan runut dan ketika tantangan muncul, yang terpenting adalah jangan pernah menyerah. Seiring AIPJ memasuki tahap ketiga, harapan terbesar saya adalah agar program ini membangun di atas fondasi yang telah diperjuangkan, sekaligus beradaptasi dengan tantangan baru, membantu kedua negara membangun masyarakat yang lebih inklusif, memperkuat kepercayaan publik dan memastikan kemajuan teknologi membawa kesejahteraan bersama, sembari mempererat semangat “tetangga” sepanjang masa antara Australia dan Indonesia.



Luke Arnold

**First Secretary, Governance,
Kedutaan Besar Australia,
Jakarta (2012-2015)**



Aria Suyudi

**Ketua STH Indonesia Jentera
(2024-2029) dan AIPJ Adviser**



Satu tonggak yang menonjol adalah menjadi saksi sejarah evolusi kerja sama antar-pengadilan Indonesia dan Australia, mulai dari kerangka kerja sama pertama pada 2004 hingga penandatanganan Nota Kesepahaman 20 tahun di Jakarta pada 2024, sebuah perjalanan yang mencerminkan kepercayaan, konsistensi, dan komitmen bersama yang luar biasa terhadap reformasi peradilan. AIPJ berperan strategis sepanjang perjalanan tersebut, termasuk dalam reformasi hukum komersial yang bermakna seperti penyelesaian sengketa gugatan sederhana dan modernisasi *e-court*. Tantangan terbesar adalah mempertahankan momentum di tengah pergeseran prioritas kelembagaan dan kepemimpinan. Reformasi jangka panjang yang berhasil tidak hanya bergantung pada keahlian teknis, namun juga pada kesabaran, kepercayaan, dan kemampuan beradaptasi. Ini semua merupakan kualitas yang telah mendefinisikan kesanggupan kemitraan untuk terus terlibat serta responsif dalam tiap transisi. Menuju tahap ketiga, saya berharap AIPJ tetap berfokus pada reformasi kelembagaan yang mendasar dan jangka panjang, bukan sekadar untuk respon jangka pendek, memperdalam pendekatan yang dipimpin secara lokal, serta terus berinovasi dalam menghadapi perubahan teknologi dan harapan publik yang terus berkembang.

Dua capaian besar yang dilanjutkan dan diperkuat oleh AIPJ saat ini hampir dianggap sebagai sesuatu yang biasa - hal ini, menurut saya, menjadi testimoni dari efektivitas program.

Capaian pertama adalah mendukung kerja sama reformasi hukum antara pemangku kepentingan masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan. Ini melibatkan strategi triangulasi di mana AIPJ bekerja erat dengan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah, mendukung riset untuk mengatasi masalah, dan program kemitraan untuk menjalankan upaya reformasi tersebut.

Capaian lainnya adalah reformasi kerja sama antara peradilan Australia dan Indonesia. Nota Kesepahaman pertama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Federal Court of Australia pada 2004 merupakan kerja sama antar peradilan pertama secara global yang didukung melalui dana bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengacara dari dua sistem dan budaya hukum yang sangat berbeda memiliki kesamaan yang lebih dibanding apa yang mereka bayangkan!

Sepanjang perjalanannya, perubahan kebijakan yang mendadak terkadang memaksa AIPJ dan program pendahulunya untuk datang dengan 'solusi kreatif' agar dapat terus terlibat dan mengembangkan kemitraan. Meski tantangan selalu ada, namun hubungan program yang erat dengan sektor hukum di Indonesia dan mitra masyarakat sipil menjadi kunci kesuksesan. Sama halnya dengan proses besar reformasi yang telah terhenti selama satu dekade terakhir dan pada beberapa isu mengalami kemunduran. Situasi ini diiringi dengan meningkatnya tekanan terhadap masyarakat sipil, yang dalam banyak hal, adalah penggerak untuk perkembangan kebijakan dan perubahan hukum selama tiga dekade terakhir. Harapan terbesar saya adalah AIPJ dapat terus melanjutkan kerja-kerja yang mendukung masyarakat sipil, think tanks, dan tokoh-tokoh reformasi hukum untuk mengembangkan dan menjalankan reformasi yang tengah berlangsung, yang menjadi kunci untuk berkembangnya masyarakat yang demokratis.



Prof. Tim Lindsey
AIPJ Adviser



Saya terlibat dalam hampir semua tahapan program AIPJ dalam kapasitas yang berbeda-beda — sebagai bagian dari Ausaid/DFAT di AIPJ1, sebagai Direktur di TAF selama AIPJ2 dan saat ini sebagai Justice and Security Lead di AIPJ3. Bekerja di AIPJ dalam peran yang beragam telah memberikan saya tidak hanya pengetahuan yang lebih baik mengenai isu programatik tetapi juga bagaimana kerja sama Australia - Indonesia telah berkontribusi dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk reformasi. Program ini menjadi *melting pot* bagi masyarakat sipil dan kedua pemerintah untuk menginisiasi dan menindaklanjuti gagasan reformasi di sektor keadilan. AIPJ juga telah menjadi ruang untuk membina kerja sama antar sejawat lembaga penegak hukum di Australia dan Indonesia. Pelajaran penting dari perjalanan 15 tahun ini adalah untuk mengakui bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah akan menentukan kualitas dan keberlanjutan dari inisiatif reformasi sektor keadilan di Indonesia.



*Doddy
Kusadrianto*

**Justice and Security Lead,
AIPJ3**



Nani Zulminarni

**Founder and Director Yayasan
Pemberdayaan PEKKA
(2001 - 2020)**

Lewat kerja sama panjang antara PEKKA dengan AIPJ, salah satu kontribusi terbesar AIPJ untuk sistem peradilan di Indonesia adalah peran AIPJ menjembatani serta membuka akses bagi masyarakat sipil dalam mendorong penggunaan bukti dari akar rumput ke dalam dialog dan reformasi kebijakan di Mahkamah Agung dan lembaga kunci lain.

Ketika PEKKA mulai mengorganisir komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pada tahun 2001, kami menemukan bahwa 60% perempuan kepala keluarga tidak memiliki dokumen pernikahan atau perceraian resmi. Hal ini membuat banyak anak lahir tanpa akte kelahiran dan menghadapi masalah legalitas dan tantangan sosial yang besar. Komunitas PEKKA umumnya kekurangan informasi mengenai hak hukum dan cara mengakses sistem peradilan.

Dengan dukungan AIPJ, kami mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi praktis—yakni sidang keliling dan penguatan kapasitas paralegal komunitas—yang mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta memungkinkan mereka sebagai narasumber penelitian untuk memperoleh manfaat langsung lewat solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Upaya ini juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan nasional dan membantu melembagakan inisiatif seperti KLIK PEKKA, klinik layanan informasi dan konsultasi hukum berbasis komunitas yang beroperasi di lebih dari sepuluh provinsi di Indonesia.

Di luar reformasi hukum, AIPJ juga mendukung kegiatan *storytelling* dan jurnalisme warga—termasuk melalui buletin sederhana—sebagai sarana pemberdayaan bagi para penerima manfaat kegiatan kami,

yang sebagian besar merupakan kelompok masyarakat paling miskin dan belum aktif menggunakan media sosial. Selanjutnya, kami secara bertahap memperkenalkan platform media sosial agar mereka dapat berbagi cerita, menyebarkan informasi, dan memperkuat hubungan antar anggota komunitas PEKKA.

Pendekatan AIPJ merupakan model yang khas dan efektif dalam mendorong perubahan sistem serta perubahan cara pandang, karena mampu menghubungkan realitas di tingkat akar rumput dengan reformasi kebijakan di tingkat nasional, sekaligus mengubah perspektif mengenai akses terhadap keadilan bagi perempuan kepala keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Kami sangat menghargai dukungan berkelanjutan AIPJ terhadap strategi akses terhadap keadilan yang kami jalankan dan berharap pendekatan ini terus berlanjut pada Tahap 3.

Perjalanan saya bersama kemitraan berawal di 2013. Kala itu saya bersama tim SIGAB dan kami tengah memetakan dan mendalami isu akses terhadap keadilan dan dukungan hukum bagi penyandang disabilitas. Pada 2017, saya berkesempatan untuk terlibat lebih dalam proses teknokratik. Melalui dukungan yang diberikan untuk Sekretariat Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, saya belajar untuk menjembatani aspirasi dari gerakan disabilitas dengan proses teknokratik pemerintah menggunakan pendekatan berbasis bukti.

Seiring berjalannya waktu, kemitraan ini telah berkontribusi dalam kemajuan yang bermakna, termasuk pengembangan berbagai regulasi di dalam maupun di luar sektor keadilan. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa kemitraan tidak selalu mudah, namun pada akhirnya kemitraan adalah tentang membangun kepercayaan, berbagi tanggung jawab, dan bekerja menuju tujuan bersama. Meskipun AIPJ telah mencapai kemajuan yang signifikan, saya percaya ini masih permulaan bagi gerakan disabilitas. Saya berharap kemitraan ini akan terus memperkuat kebijakan-kebijakan yang lebih berdampak dan inklusif di dalam sektor keadilan.



Foni Yulianto

**SIGAB Director
(2013-2017; 2024-sekarang)
and AIPJ Adviser**



2013

Selama 15 tahun bersama dengan AIPJ, salah satu tonggak capaian paling transformatif bagi saya adalah transisi menuju AIPJ2, saat saya beralih dari peran yang sebagian besar bersifat operasional menjadi penanggung jawab strategi pencegahan ekstremisme kekerasan dan kemudian berkontribusi untuk portofolio penanggulangan kejahatan lintas batas. Berawal dari bidang yang benar-benar baru menjadi perjalanan berisi pelajaran dan pengembangan, yang dibentuk oleh kolaborasi erat dengan pemerintah dan mitra masyarakat sipil. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa kemitraan sejati dibangun tidak hanya lewat kolaborasi formal namun juga dengan kepercayaan jangka panjang, komunikasi yang terbuka, saling belajar, dan hubungan antar individu yang erat. Saya harap AIPJ3 terus memperkuat kemitraan ini, seiring kita tumbuh dan bekerja bersama-sama, adaptif terhadap perubahan-perubahan yang muncul, serta membuka ruang dialog dan kolaborasi untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.



Afnia Sari

**Strategy Manager for
Preventing Violent Extremism
and Transnational Crime, AIPJ3**



2016

Satu tonggak sejarah yang menonjol dalam 15 tahun kemitraan ini adalah amandemen Undang-Undang Perkawinan Indonesia pada 2019 dan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, yang menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. AIPJ dan MAMPU bekerja tanpa kenal lelah bersama mitra pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai perubahan transformatif ini. Perubahan ini dipimpin oleh kekuatan dan keteguhan mitra-mitra dari Makassar, yang mengubah isu yang dulu dianggap tabu menjadi reformasi legislatif yang berkelanjutan. Perjalanan tersebut mengajarkan kami bahwa kesabaran, membangun kepercayaan, dan keselarasan dengan prioritas bersama dapat mengubah kompleksitas menjadi peluang, menciptakan ruang bagi kolaborasi yang lebih kaya di antara beragam pemangku kepentingan. Kini memasuki tahap ketiga, saya berharap AIPJ terus mendukung komunitas marginal dalam membentuk sistem peradilan yang lebih adil, lebih mudah diakses, dan lebih akuntabel dengan ruang yang semakin luas bagi para ahli yang berpengalaman langsung dan para pencari keadilan untuk memimpin jalannya perubahan.



Lucia Pietropaoli

**First Secretary, Justice and
Democratic Governance,
Kedutaan Besar Australia,
Jakarta (2016-2019)**



Momen yang benar-benar berkesan bagi saya adalah peralihan dari AIPJ2 ke AIPJ3. Yang paling menonjol adalah kepercayaan. Kami bisa berbincang dengan terbuka dan jujur, bahkan tentang isu-isu yang sulit. Bagi saya, AIPJ menjadi lebih dari sekadar program namun bagaimana kedua negara bekerja sama dan saling memahami dengan lebih baik. Ini menunjukkan bagaimana kerja sama dalam bidang keadilan dan keamanan juga dapat memperkuat hubungan bilateral yang lebih luas. Yang telah saya pelajari adalah kepercayaan menjadi sangat penting. Kita tidak bisa datang dengan jawaban yang sudah disiapkan, kita perlu mendengarkan, memahami, dan mendukung apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Ketika kita melakukan itu, upaya-upaya kita menjadi lebih bermakna dan berlangsung lebih lama. AIPJ juga menunjukkan kepada saya bahwa ini bukan hanya tentang pembangunan namun juga bagaimana memperkuat hubungan antara negara dengan menciptakan ruang percakapan yang jujur dan membangun rasa hormat. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita bekerja sama. Hubungan yang kuat memungkinkan kita untuk terus maju, bahkan ketika menghadapi tantangan.

Harapan saya untuk AIPJ3 sederhana yaitu agar terus mempererat hubungan Indonesia dan Australia. AIPJ adalah contoh yang baik tentang bagaimana kerja sama dalam isu-isu praktis dapat membangun kepercayaan dan pemahaman antar negara. Jika kita dapat mendukung reformasi nyata sambil mempertahankan kemitraan yang kuat tersebut, saya pikir AIPJ3 akan memiliki dampak yang berkelanjutan.

Bagi kami, yang menarik dari kemitraan ini adalah sifatnya yang jangka panjang, berbasis kepercayaan, dan adaptif dalam mendukung agenda reformasi sektor keadilan Indonesia. Selama 15 tahun terakhir, kemitraan Australia-Indonesia telah berkembang melampaui kerja sama pembangunan yang tradisional menjadi kolaborasi strategis yang selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan kelembagaan Indonesia. Kemitraan ini menekankan pembelajaran bersama dan pembangunan yang dipimpin secara lokal, dengan menghormati Indonesia dalam memimpin reformasi seraya membuka ruang bagi inovasi, pertukaran pengetahuan, dan eksperimentasi kebijakan. Hal ini menciptakan fondasi yang lebih berkelanjutan untuk penguatan kelembagaan jangka panjang.

Salah satu pergeseran yang menjanjikan dalam AIPJ3 adalah pengakuan secara eksplisit bahwa pemerintah tidak dapat dan tidak seharusnya mendorong sektor keadilan secara terpisah. Program ini menunjukkan pendekatan yang semakin terarah dalam merencanakan kegiatan, di mana lembaga pemerintah bekerja berdampingan dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga akademik, dan aktor non-negara lainnya sebagai kontributor bersama dalam proses reformasi.



Ade Ganie

Unit Manager, Justice and Democratic Governance, Kedutaan Besar Australia, Jakarta (2016-sekarang)



*Hendra Wahanu Prabandani
S.H., LL.M.*

Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bappenas (2025-sekarang)

2016

2025

Ini merupakan perubahan yang bermakna dari model di mana pemerintah menjadi satu-satunya pelaksana dan OMS diperlakukan sebagai suara marginal. Ketika kemitraan ini terstruktur dengan baik, kedua pihak memperkuat kualitas sekaligus legitimasi hasil reformasi. Ke depan, Bappenas akan terus memainkan peran strategis dalam menyelenggarakan dan berkoordinasi dengan mempertemukan kementerian, lembaga penegak hukum, institusi peradilan, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil guna memastikan upaya reformasi tetap selaras, berbasis bukti, dan responsif terhadap tantangan yang berkembang.

Kami juga melihat pentingnya membangun keberlanjutan yang lebih besar dan kepemimpinan lokal dalam kerja sama ke depan. Ini berarti mendorong kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, meningkatkan penggunaan data dan evaluasi kebijakan, serta memastikan inisiatif reformasi terintegrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional, bukan sekadar berbasis proyek.

Tahap berikutnya dari kemitraan ini tidak hanya melanjutkan dukungan terhadap reformasi inti di sektor keadilan, namun juga merespon prioritas-prioritas baru seperti tata kelola digital, layanan publik terpadu, tantangan hukum lintas negara, perlindungan kelompok rentan, dan kebutuhan yang terus berkembang dari visi pembangunan jangka panjang Indonesia. Pada akhirnya, kami memandang warisan kemitraan 15 tahun ini bukan sekadar sejarah kerja sama Australia-Indonesia di bidang keadilan dan keamanan, melainkan sebagai fondasi kepercayaan dan komitmen bersama yang dapat mendukung reformasi kelembagaan yang lebih dalam dan transformatif di tahun-tahun mendatang.

Jejak capaian selama 15 tahun kemitraan telah menjadi fondasi yang solid di sektor keadilan dan keamanan, dengan tata kelola dan koordinasi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil di Australia dan Indonesia. Sebagai Equity Lead AIPJ3, saya juga melihat dalam ekosistem ini pentingnya kebijakan terkait lingkungan kerja yang aman, terutama untuk menegakkan prinsip dan implementasi perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Hal ini dapat dikembangkan dengan standar tertinggi dan saya berharap dapat membagi pandangan dan keahlian untuk menjadi nilai tambah dalam sektor dan kemitraan ini.



Syafirah Hardani
Equity Lead, AIPJ3

2025

Ini kali pertama saya bergabung dengan program dukungan Pemerintah Australia secara penuh waktu dan merupakan kesempatan yang menarik. Peran saya adalah untuk memfasilitasi tim dalam perjalanan mencapai tujuan jangka panjang kemitraan. Saya mengapresiasi bagaimana pengukuran hasil program dihubungkan secara erat dengan desain dan pendekatan program, sehingga memberi ruang agar perubahan perilaku dan cerita mengenai dampak program terlihat lebih kuat seiring perkembangan waktu. Dalam pelaksanaannya, saya percaya pentingnya membangun kerja sama berkelanjutan antara tim program dan pemangku kebijakan, memastikan bahwa pengukuran proses mendukung pencapaian tujuan bersama, bukan alih-alih mengganggu.



Yulianto Dewata

Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Manager, AIPJ3



2026

Sebagai anggota tim baru, menjadi sebuah kejutan besar bagi saya merasakan betapa eratnya kolaborasi serta terbukanya kemitraan ini. AIPJ3 memiliki sistem tata kelola dan prinsip cara kerja yang mendorong kepemimpinan lokal dan memberdayakan mitra untuk mencapai prioritas kebijakan yang telah disepakati serta penting bagi Pemerintah Australia dan Indonesia. Komunikasi terasa konstruktif, dan adanya arah tujuan bersama serta rasa saling menghargai semakin memotivasi kolaborasi dan proses kreasi bersama sebagai satu tim. Pencapaian yang telah lama terbangun mencerminkan konsistensi, kepercayaan, visi bersama, dan keselarasan. Penting bagi kita untuk terus membangun di atas nilai-nilai tersebut sekaligus tetap terbuka untuk berkembang dan berinovasi.



Marie Astrid Wijaya

Partnership Manager, AIPJ3



Dulu, AIPJ dan perannya dalam mendukung upaya menanggulangi terorisme di Indonesia hanya subyek akademik yang saya minati. Saya tidak pernah membayangkan bisa bergabung sebagai bagian dari AIPJ3 di kemudian hari.

Perjalanan karir saya tidak sepenuhnya linear. Setelah awalnya bekerja di sektor privat yang berfokus pada bidang komunikasi digital dan branding, saya sempat pindah ke sektor lain. Meskipun pekerjaan tersebut menyenangkan secara profesional, ada suatu hal yang terasa hilang. Hal tersebut membuat saya mempertanyakan apakah ini adalah tempat yang tepat untuk saya berkontribusi.

Bergabung dengan AIPJ3 sebagai Public Diplomacy Officer merubah pandangan tersebut. Saya merasakan manfaat dan pemberdayaan yang besar dari pekerjaan saya; bahwa kontribusi yang saya berikan, meskipun kecil, merupakan bagian dari dampak nyata bagi kehidupan komunitas dan masyarakat. Kemitraan ini tidak hanya memberikan saya sebuah peran, tetapi juga alasan untuk tinggal, berkembang, dan maju dengan sebuah tujuan. Menyelesaikan pekerjaan adalah satu hal, namun membantu agar orang lain mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan mereka memperoleh manfaatnya adalah hal yang berbeda. Saya selalu percaya bahwa kita tidak pernah kehabisan kebijakan yang baik. Yang terkadang tidak kita miliki adalah jembatan yang menghubungkan kebijakan tersebut dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Jembatan itu adalah cerita dan advokasi yang kita bagikan.

Saya juga terkejut dengan interaksi tim yang seimbang antara profesionalisme dan keakraban. Semua orang sangat peduli, tidak hanya tentang perkembangan profesional satu sama lain, tetapi juga kesejahteraan individu. Bagaimana setiap orang saling menyuarakan dan mendukung rekan lainnya adalah sesuatu yang tidak saya duga, dan itu sangat berarti.



Farah Oedjianto

Public Diplomacy Officer, AIPJ3





Mendorong Akses terhadap Keadilan Melalui Inovasi Digital

Australia dan Indonesia mempererat kerja sama dalam reformasi sistem peradilan melalui inovasi yang berfokus pada pengembangan kapasitas digital dan teknologi.

Pada Mei 2026, Pemerintah Australia melalui AIPJ3, bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Australia Awards Indonesia (AAI), meluncurkan kursus singkat bertajuk Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Sektor Hukum dan Keamanan.

Mulai 25 Mei hingga 5 Juni 2026, sebanyak 25 peserta dari sektor publik dan swasta di Indonesia akan berpartisipasi dalam program yang didesain untuk memperkuat keterampilan dalam menghadapi peningkatan digitalisasi pada ranah hukum dan keamanan. Kursus singkat berfokus pada inovasi teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) perkembangan teknologi, dan

pengambilan keputusan berbasis data dalam sektor peradilan.

Program mencakup lokakarya di Indonesia dan kursus intensif selama dua minggu di Australia, dilanjutkan dengan sesi pasca-kursus, di mana para peserta akan mempresentasikan proyek kegiatan yang menerapkan hasil pembelajaran. Para peserta sepakat bahwa kursus singkat ini sangat relevan dengan perkembangan terkini di Indonesia (maupun global), khususnya dalam bidang interoperabilitas data dan tata kelola AI, mengingat kedua isu tersebut berperan penting dalam pengembangan sektor ini.

AIPJ3 juga akan memfasilitasi seminar bagi para peserta untuk memaparkan proyek kegiatan hasil kursus pada Oktober 2026, dengan kemungkinan untuk menjadi bagian dari kegiatan AIPJ3.



Atas perkenan Australian Awards Indonesia

Peserta kursus singkat selama program intensif dua minggu di Australia.



Mahkamah Agung Republik Indonesia Luncurkan Buku Saku Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang



Atas perkenan ASEAN ACT

(dari kiri ke kanan) Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, Yang Mulia Hakim Agung Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.Hum., dan Duta Besar Australia untuk ASEAN, Tiffany McDonald, mendampingi Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Hakim Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyerahkan buku panduan kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ibu Anis Hidayah, S.H., M.H.

Pada 13 April 2026, Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan Buku Saku Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, menandai langkah penting menuju penguatan sistem peradilan yang berpusat pada korban untuk penyintas perdagangan orang.

Perdagangan orang tetap menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius di Indonesia, meninggalkan korban yang mayoritas perempuan dan anak dengan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi berkepanjangan. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.



Peradilan tidak hanya dituntut menegakkan hukum tetapi juga memastikan terpenuhinya hak korban, termasuk hak atas restitusi sebagai bentuk keadilan yang memulihkan martabat

korban. Buku saku ini mencerminkan kolaborasi dalam memperkuat perlindungan korban dan diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen normatif, melainkan sebagai instrumen praktis yang mendorong perlindungan dan pemenuhan hak korban secara lebih efektif



disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., MH., dalam sambutannya.

Baca selengkapnya: [MA Luncurkan Buku Saku Restitusi Perkara TPPPO, Perkuat Perlindungan Korban Perdagangan Orang](#)

Buku saku dikembangkan oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung bekerja sama dengan program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN ACT), dengan dukungan teknis dari AIPJ3. Dirancang untuk hakim, jaksa, pengacara, dan aparat penegak hukum, buku saku bertujuan membantu dalam penerapan mekanisme restitusi secara konsisten dalam perkara perdagangan orang. Buku saku ini juga mencakup akses terhadap dana bantuan bagi

penyintas perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi seksual, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Duta Besar Australia untuk ASEAN, Tiffany McDonald menyoroti bahwa

Australia bangga telah mendukung inisiatif ini, serta menegaskan komitmen bersama untuk memastikan bahwa keadilan dalam perkara perdagangan orang tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, namun juga dari pemenuhan hak dan martabat korban.



Atas perkenan Kedutaan Besar Australia

Anjing pelacak K9 DJBC, Xandra, mendemonstrasikan kemampuan deteksi narkotika dalam sebuah simulasi, menampilkan hasil dari pelatihan khusus yang telah dijalani.



Indonesia dan Australia Perkuat Pengawasan Perbatasan Melalui Program Anjing Pelacak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia (DJBC) dan Australian Border Force (ABF) menjalani kerja sama yang telah berlangsung lama untuk menanggulangi kejahatan lintas batas yang berfokus pada pengembangan kapasitas, pertukaran pengetahuan, pertukaran data, dan saling mendukung dalam Forum World Customs Organization (WCO). Berawal dari Custom to Custom Talk pada 1993, tahun ini kemitraan akan menandatangani pembaruan Nota Kesepahaman. Kemitraan telah berkontribusi untuk penguatan keamanan perbatasan dan kerja sama ekonomi antara Australia dan Indonesia.

Pencapaian besar dari kemitraan ini adalah Regional Dog Training Center (RDTC) di Rawamangun, Jakarta Timur. Diakui oleh WCO sebagai fasilitas pelatihan anjing pelacak terdepan di Asia Tenggara, RDTC saat ini menampung sampai dengan 60 anjing yang terlatih untuk mendeteksi narkotika dan uang tunai yang terkait dengan pencucian uang maupun menyediakan fasilitas pelatihan bagi Indonesia dan wilayah Asia Pasifik.



Program anjing pelacak penting bagi ekosistem pengawasan perbatasan Australia – Indonesia dan merefleksikan kemitraan yang erat untuk menanggulangi penyelundupan narkotika dan kejahatan lintas batas. Kami bangga dapat bermitra dengan rekan-rekan kami di DJBC



tutur Inspektur Sarah Body, First Secretary ABF - Indonesia and Timor-Leste.

RDTC memfasilitasi anjing pelacak yang aktif, baru dilatih, dan pensiun. Salah satu anjing pelacak yang paling terkenal adalah Andro, Labrador Retriever berusia 12 tahun yang telah membantu mendeteksi **2,6 ton sabu dalam dua operasi besar maritim di Batam pada 2018**, dan membongkar



Atas perkenan Kedutaan Besar Australia
Xandra dan pawang anjing pelacak
menjalankan latihan deteksi kargo.

penyelundupan narkoba yang diestimasikan senilai 17 miliar rupiah di Riau pada 2021.

Selama masa transisi AIPJ3, ABF mendukung DJBC melalui pelatihan teknis dan inisiatif untuk mengembangkan kesejahteraan anjing pelacak, termasuk program masa pensiun dan pelatihan. ABF juga memfasilitasi program pertukaran untuk empat penjaga anjing pelacak DJBC melalui ABF Detector Dog Program di Perth, Australia pada Februari 2026 dan menggelar *Pawsome Festival pada Oktober 2025*.

“Kerja sama dengan ABF memberikan kesempatan berharga bagi instruktur dan pawang anjing pelacak kami

untuk bisa belajar dari Australia. Ke depannya, kami berencana untuk membangun pusat pembiakan agar dapat menghasilkan anjing pelacak yang lebih kuat dan tangguh sehingga upaya penanggulangan penyelundupan narkoba berjalan maksimal,” kata *Denny Benhard, Kepala Unit Subdivisi Anjing Pelacak (K-9) di DJBC*.

Program anjing pelacak ABF – DJBC, bersama lokakarya ancaman perbatasan dan inisiatif kepemimpinan perempuan di garis depan, merupakan bagian dari Australia – Indonesia Strong Borders Program yang didukung oleh AIPJ3 untuk tahap implementasi yang dimulai pada Juni 2026.

Salam Hangat dari Tim Kami - Anggota baru hingga Mei 2026.



Kiri ke kanan:

1. Hapsari Sapta Dewi (Rian) – Activity Coordinator
2. Anastasia Vania Putri (Putri) – Strategy Manager, Commercial Law Reform and Responses to Climate Change

